

# Prancis dalam Sejarah Indonesia



**Heri Priyatmoko**  
Dosen Sejarah, Universitas Sanata Dharma Semarang Solo

**S**apa ilmuwan cum seniman di Kota Solo yang pernah *ngangsu kawruh* di Prancis? Membolak-balikkan buku *Rantau dan Renungan* (1999), akan Anda temui cerita pahit-manis Rahayu Supanggah (ISI Surakarta) dan Andrik Purwasito (UNS) kala bersekolah di negeri Menara Eiffel itu. Kemarin, saat Paris diguncang aksi para teroris, tentu mereka tertunduk sedih. Tali batin dan *rasa kamanungsan* mengikat mereka untuk tidak melupakan kota itu. Hubungan intelektual Indonesia-Prancis memang terbilang intim, dengan tokoh Denys Lombard yang melahirkan segudang ilmuwan Indonesia.

Secara historis, Indonesia juga punya pengalaman dengan Prancis. Masyarakat Indonesia dikenalkan konsep Marsekal Herman Willem Daendels bernama Hindia Belanda, dan upaya pemberantasan korupsi pejabat *tempo doeloe*.

Daendels memegang tampuk kekuasaan di Hindia Belanda bermula dari kekalahan militer Belanda atas serangan tentara Prancis selama kurun Desember 1794 hingga Januari 1795. Serdadu Prancis di bawah naungan Napoleon Bonaparte sukses membentuk pemerintahan bonekanya di negeri Belanda. Secara otomatis, wilayah Hindia Belanda yang awalnya dipegang pemerintah Belanda segera beralih tangan ke pemerintah Prancis. Setahun selepas Daendels menerima surat pengangkatan dirinya sebagai gubernur jenderal, Louis Napoleon, anak dari saudara Napoleon Bonaparte, mengirimnya ke wilayah kolo-

pertahankan Jawa dari invasi Inggris serta mengadakan pembenahan di berbagai lini.

Djoko Marihandono dalam desertasinya (2005) menjelaskan, setibanya di Jawa, Daendels memergoki aneka bentuk penyimpangan yang memuncak. Sekeping fakta, Pieter Engelhard, utusan Pejabat Masalah Pribumi, dipaksa mundur dari jabatan birokrasi lantaran melakukan korupsi. Bertambah parah, orang yang menggantikannya tidak berusaha membenahi keadaan, malah memeras pejabat lokal. Mental buruk pejabat tinggi dan bawahannya kadung mengakar dan menambah pemerintahan ambaradul. Ragam masalah itu tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa perombakan

Para pejabat digaji tinggi biar mereka fokus dalam bekerja, tak perlu berpikir ulang mencari tambahan uang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Langkah pertama Daendels merombak organisasi "almarhum VOC", yakni membentuk Pemerintahan Tinggi di Batavia pada 30 Maret 1808. Konsep dan organisasi VOC yang bersifat persekutuan, kontrak dagang, ataupun hubungan dengan keraton Jawa digarap oleh Daendels. Para duta Belanda dan residen di berbagai keraton Jawa dilarang bertindak sebagai duta dari suatu negara vasal (bawahan) terhadap para raja Jawa. Sebelum masa Daendels, para duta dan residen VOC di istana Jawa

utamanya adalah Daendels menyoal struktur sosial-politik yang memposisikan petinggi kolonial satu tingkat di bawah penguasa tradisional. Maka, struktur yang dinilai menyepelekan kekuasaan bangsa Eropa ini harus didekonstruksi.

Sembari mengumumkan dan menerapkan instruksi itu, ia mereorganisasi pantai timur laut Jawa tanggal 24 Februari 1808. Caranya, mengubah struktur residen pertama di Surakarta dan Yogyakarta yang semula di bawah tanggung jawab gubernur pantai timur laut Jawa diganti di bawah gubernur jenderal. Mereka punya kewenangan menjalin hubungan langsung dengan gubernur pantai timur laut Jawa untuk mengurus-

lainya sewaktu berkumbar para *Gezagheb* (bupati) dan residen dari Juli-September 1808 di marang. Rapat bersama bupati se-Jawa melahirkan putusan bahwa Daendel memberi gelar *prefect* pada para residen perta. *Prefect* ditugasi memaan bupati dan pejabat agadak memperlakukan rak sewenang-wenang.

Guna memantapkan langkahnya memperb sistem administrasi di erah koloni, Daendels nerbitkan kebijakan ke Umpamanya, buku lapo keuangan berisikan ad nistrasi, perdagangan barang-barang lain, posisi kreditur atau deb dalam nilai. Lalu, diang lah tenaga khusus menc buku neraca umum pe rimaan, pengapalan, pengeluaran semua bar dan uang. Semua catata diperiksa secara berkala.

Kita dapat membay kan gagasan peromb sistem birokrasi di Hi Belanda sangatlah i untuk ukuran masa itu penuh keterbukaan. I kan, bagian dari sistem gara modern ini dapat rasakan sampai kini, y realisasi keinginan pe kenegaraan pajabat ti di pemerintahan terka penting masyarakat harus sepengetahuan wan Hindia. Hal tersebu lakukan demi menghir atau menjauhkan tindi *semesta-negara* *leffem* korupsi.

Demikianlah, "wa an" negara Prancis kepi Indonesia. Sayangnya, mangat) aksi penceg dan pemberantasan kor belum menggelora. Bu ya tebang pilih masih tihat, tidak pukul rata laik Daendels yang dijuluki N sekal Besi atau Mas Ga karena memang galak. In an historis ini perlu diran bukan pengalaman dija tapi strategi mengatur ne ra Hindia Belanda oleh Prcis yang begitu rapi. Dal kasus terorisme di Paris marin, kita sudah selayak ikut berduka, sebagai ser sa mahluk Tuhan. ■



yang revolusioner. Bermacam aksi Daendels nantinya dipandang sebagai tindakan di luar kebiasaan para pendahulunya. Maktum, Daendels adalah seorang gubernur jenderal yang tidak memiliki pengalaman bekerja di Hindia Belanda. Juga bukan berasal dari lingkungan pejabat di Batavia, tempat asal para calon gubernur jenderal.

Daendels memberi pangkat militer kepada seluruh pejabat di daerah sebagai simbol kekuasaan yang mengatur relasi antara pusat dengan daerah. Misi pokok yang terselip ialah agar memudahkan pengawasan dan pengendalian aparat di bawahnya. Juga supaya para birokrat tertular sikap disiplin tentara, sehingga pengawasan dan pengendalian aparat yang berada di

bila bertemu dengan para raja selalu membawakan sirih lengkap dengan kapur, tembakau dan lainnya, atau segelas anggur. Ini gambaran tingkah laku dari kekuatan vasal (*tundukan*) kepada yang dipertuan.

Sejarawan Onghokham (1984) menginterpretasi, dalam pemahaman Daendels, tata cara para duta dan residen tersebut mungkin pantas sebagai wakil suatu perseroan dagang, tetapi tidak patut dikerjakan oleh seseorang yang memegang kehormatan wakil seorang raja Belanda, Louis Napoleon. Daendels, yang bermental militer dan berwatak keras, secara tegas menginginkan pejabat Belanda di berbagai keraton harus menempatkan petinggi kolonial setingkat dengan para raja. Sebab mereka mewakili

masalah rumah tangga, permintaan uang dan kebutuhan lain yang mendasak seperti penyeteroran hasil bumi. Daendels menugasi pejabat Belanda bukan cuma mengurus perdagangan dan produksi, tapi juga peradilan, keamanan dan perizinan.

Lantaran mendapati banyak ketidakefisienan, penyelewengan, dan aneka bentuk tindak korupsi yang menyelimuti administrasi birokrasi, Daendels tergerak mereformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan Eropa maupun pribumi. Bernard Vlekke (2009) mencatat, Daendels memu-